

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem keorganisasian dan kinerja dalam Peraturan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang peneliti ambil di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara yang terdiri dari Unit Gelanggang Olahraga Sunter dan Unit Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya, yang dimana mereka masih memiliki Struktur Organisasi dimana kepala Masih tersendiri sehingga dalam pembuatan laporan kinerja tahunan masih terpisah untuk dilaporkan ke Dinas. Dalam hal ini dimana Dinas sebagai titik pemberkasan teramat sangat rumit, kurang efektif, dan efisiensi dalam penanganan pemberkasan dalam penggunaan anggarannya pun untuk kegiatan masing- masing cukup teramat sangat tidak efektif dalam satu kawasan Jakarta Utara. Untuk menciptakan yang dapat mendukung keefesiensian dan keefektifan kinerja karyawan (PNS) serta dalam penanggulangan APBD untuk lebih bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan, maka ditahun 2016 di terbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dimana bertujuan merubah struktur organisasi di Ruang Lingkup Bidang Keolahragaan diantara Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya dan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Sunter Jaya menjadi satu dengan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara. yang dimana Kepala penanggung jawab hanya satu dan membentuk Struktur Organisasi yang menjadi satu antara Unit GOR Sunter dan Unit GOR Bahtera Jaya kepada Suku dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara dimana program kegiatan keolahragaan, kepemudaan, kepemeliharaan, dan penanganan anggaran digabung menjadi satu elemen di Suku Dinas Administrasi Jakarta Utara dalam pembuatan laporan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode hukum normative dan menggunakan data analisa deskriptif. Dimana hasil questioner yang peneliti kumpulkan memberikan hal yang positif terhadap peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah hampir semua pegawai menyetujui perubahan karena sistematika organisasi dan kinerja pegawai lebih maksimal dan efektif namun kurangnya sosialisasi dalam penerapan perubahan Peraturan Pemerintah yang lama ke Peraturan Pemerintah yang terbaru terhadap Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara. Dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Agar mengoptimalkan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam memperbaiki pendataan birokrasi sehingga menjadi tertata dengan rapih namun seharusnya Pemerintah melalukan sosialisasi terdahulu dalam merencanakan adanya penggabungan terhadap Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara secara cepat karena membutuhkan proses sehingga pelayanan masyarakat tetap berjalan.